

## KEARIFAN LOKAL PANGLIMA LAOT DALAM PENGELOLAAN PESISIR DI KABUPATEN BIREUEN SEBAGAI BAHAN KAJIAN MATA KULIAH OCEANOGRAFI

Muslihin<sup>1</sup>, Wahyudi<sup>2</sup>, Aisyah A Rahman<sup>3</sup>, Amelia Zahara<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Almuslim  
<sup>1</sup>muslihin@umuslim.ac.id, <sup>2</sup>wahyudi.geography@gmail.com, <sup>3</sup>aisyaaar7@gmail.com,  
<sup>4</sup>ameliazahaara@gmail.com

### ABSTRAK

Eksistensi panglima *laot* di Aceh, berperan menjalankan hukum adat *laot* yang merupakan penerapan nilai kearifan lokal yang dapat menjadi sarana pembangunan nasional dalam bidang maritim, dengan melibatkan elemen masyarakat dan mahasiswa perguruan tinggi melalui kajian mata kuliah oceanografi pada program studi pendidikan geografi. Hal ini tentunya dapat mempercepat laju pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara wawancara, studi kepustakaan (studi literatur), dan observasi lapangan dengan lokasi studi kasus di kabupaten Bireuen. Penelitian ini menunjukkan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir di kabupaten Bireuen dikelola berdasarkan nilai hukum adat yang dipimpin oleh lembaga adat panglima *laot* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal secara turun-temurun masih dilestarikan dan tetap menjunjung nilai-nilai agama dan budaya dalam pemanfaatan lingkungan, membangun hubungan sosial budaya masyarakat, dan dalam pembangunan ekonomi berbasis lingkungan berkelanjutan.

**Kata kunci:** kearifan lokal, hukum adat *laot*, panglima *laot*, literasi kelautan, oseanografi

### ABSTRACT

*The existence of Panglima Laot in Aceh, plays a role in carrying out customary law of the sea which is the application of local wisdom values that can become a means of national development in the maritime field, by involving community elements and university students through the study of oceanography courses in the geography education study program. This of course can accelerate the pace of Indonesia's development to become the world's maritime axis. This study used a qualitative approach, data collection was carried out by means of interviews, literature study (literature study), and field observations with case study locations in Bireuen district. This research shows that the value of local wisdom in managing marine and coastal areas in Bireuen district is managed based on customary law values led by the Panglima Laot customary institution based on local wisdom values that have been passed down from generation to generation and still uphold religious and cultural values in the utilization environment, building socio-cultural relations with the community, and in sustainable environment-based economic development.*

**Keywords:** local wisdom, adat *laot* law, panglima *laot*, ocean literacy, oceanography

Dikirim: 12-12-2022; Disetujui: 26-12-2022; Diterbitkan: 31-12-2022

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada bidang maritim sedang menjadi prioritas saat ini karena dapat membawa perubahan strategis bagi pembangunan nasional Indonesia yang merupakan negara dengan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut, yang terdiri dari laut bagian pesisir,

laut lepas, selat, dan teluk. Luas perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 95,181 km (Hidayat, 2017). Sebagai negara maritim, Indonesia diharapkan dapat menerapkan pembangunan kelautan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya melalui potensi kelautan yang dimiliki. Pembangunan kemaritiman secara nasional merupakan sebuah konsep holistik, dengan cakupan sarana dan prasarana, teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, segenap kebijakan yang tidak bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai, konservasi yang berkelanjutan, juga perlindungan biodiversitas laut. Keberhasilan pembangunan nasional berbasis kemaritiman harus diawali dengan warga negara yang dibekali oleh pengetahuan, sikap diri, sikap percaya diri, rasa menghargai, rasa memiliki, dan persepsi mengenai laut dan pesisir.

Kesadaran pentingnya pengetahuan dasar mengenai kelautan dan pesisir telah digalakkan di negara-negara maju sejak dua dekade yang lalu. Wujud dari gerakan tersebut dalam bentuk kampanye gerakan literasi kelautan, yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pendidikan mengenai laut dan kelautan bagi warga dunia agar bersahabat dengan laut (Irawan, 2018). Untuk itu, terdapat literasi minimum yang harus dipahami khususnya pada masyarakat pesisir agar program pembangunan berbasis kemaritiman dapat terlaksana yaitu dengan literasi kelautan, yang merupakan segenap kemampuan untuk dapat memahami pengaruh osean atau lautan luas yang dikenal dengan samudra terhadap masyarakat, dan pengaruh masyarakat terhadap samudra (Cava dkk., 2005). Literasi kelautan memandang samudra tidak hanya secara fisik saja, namun juga pada aspek yang berkaitan dengannya semisal dari aspek biotik, aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek keberlanjutan, serta samudra yang melingkupi bagian wilayah selat, teluk, tanjung, pesisir, dan laut (Cahyadi dan Astiyani, 2021).

Terdapat tujuh poin penting beserta penjelasan mengenai kajian prinsip esensial literasi kelautan yang ditampilkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Prinsip Esensial Literasi Kelautan

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | <i>The Earth has one big ocean with many features</i> (Bumi memiliki satu lautan besar dengan banyak fitur bersamanya) | Lautan besar (samudra) merupakan ciri fisik di planet Bumi, yang mencakup 71% dari permukaan Bumi. Di seluruh samudra terdapat sistem sirkulasi yang saling berhubungan. |
|---|--|--|

- 2 *The ocean dan life in the ocean shape the features of Earth*  
(Samudra dan kehidupan di laut membentuk fitur/ciri-ciri bumi)  
Samudra dan kehidupan di dalamnya membentuk ciri-ciri bumi, materi bumi dan siklus biogeokimia Bumi berasal dari lautan. Banyak batuan sedimen yang muncul ke permukaan Bumi terbentuk di lautan yang disebabkan oleh erosi, dan aktivitas tektonisme.
- 3 *The ocean is a major influence on weather and climate* (Lautan berpengaruh besar terhadap cuaca dan iklim)  
Samudra berpengaruh sangat besar terhadap cuaca dan iklim, misal panas yang diterima dan dipindahkan dari samudra tropis memberi energi yang menggerakkan sirkulasi atmosfer bumi, termasuk angin siklon, angin badai, dan badai kutub.
- 4 *The ocean makes Earth habitable*  
(Lautan luas atau samudra menjadikan bumi layak huni)  
Keberadaan lautan luas yang dikenal dengan samudra menjadikan bumi sebagai planet yang layak dihuni oleh umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan samudra mendinginkan bumi dari banyaknya gunungapi aktif pada awal pembentukannya. Keberadaan samudra juga sebagai produksi oksigen ke udara. Awalnya kehidupan pertama di bumi berasal dari dari lautan yang luas atau samudra.
- 5 *The ocean supports a great diversity of life and ecosystems*  
(Lautan mendukung kehidupan dan ekosistem yang sangat beragam)  
Terdapat banyak kelompok mikroba yang merupakan organisme dan biomassa di lautan yang merupakan sumber dari semua jaringan makanan di laut. Mikroba memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, dan menghasilkan karbon dioksida, juga oksigen yang berjumlah sangat besar di bumi.
- 6 *The ocean dan humans inextricably interconnected*  
Pengaruh lautan terhadap kehidupan manusia adalah sebagai pemasok oksigen, memoderasi

(Lautan dan manusia saling berhubungan satu sama lain)	iklim, mempengaruhi cuaca di bumi, dan juga ikut mempengaruhi kesehatan seluruh penduduk bumi.
7 <i>The ocean largely unexplored</i> (Sebagian besar lautan belum dijelajahi)	Masih kurang lima persen dari lautan yang telah dijelajahi oleh umat manusia. Eksplorasi lautan bergantung pada segenap tim peneliti sains dan akademisi di seluruh dunia.

Program pembangunan berbasis kemaritiman dapat terlaksana atas dukungan penuh oleh segenap masyarakat dan kebijakan yang selaras dengannya. Tidak menutup fakta bahwa, laut dan kehidupan yang dipengaruhinya saling berkaitan erat dengan kegiatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pesisir. Ketergantungan ini merupakan bagian erat dari literasi kelautan (Utami dkk., 2021). Literasi kelautan sejalan dengan kebudayaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat di wilayah laut dan pesisir khusus. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan pluralisme secara budaya, suku, bahasa, kepercayaan, dan agama. Hal ini menyebabkan terdapat keberagaman hukum yang dengan tegas mengakui dan sangat menghormati berbagai kesatuan masyarakat hukum di Indonesia, tidak hanya secara hukum nasional, namun juga secara hukum adat yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal beserta hak-hak tradisionalnya, selama nilai kearifan tersebut masih hidup, berjalan, dan berkembang sesuai dengan prinsip hukum di NKRI (Ula, M. 2021).

Aceh merupakan wilayah yang dikelilingi oleh lautan, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km, diikuti dengan luas perairan yang mencapai 295.270 km<sup>2</sup>. Hal ini menjadikan Aceh dilimpahi sumber daya alam kelautan yang beragam dan melimpah dari sisi soal dan ekonomi. Tidak hanya itu, Aceh juga dikenal dengan kekayaan budaya berlandaskan nilai agama yang kental. Hal ini telah menjadi ciri khas wilayah Aceh yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, dan juga mempengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Aceh (Pranita, 2021). Aceh memanfaatkan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir sebagai salah satu upaya untuk pembangunan perekonomian daerahnya dengan tidak melupakan nilai-nilai keberlanjutan dan juga pengendalian ekosistem yang berkelanjutan. Hal ini terwujud melalui penerapan nilai kearifan lokal oleh masyarakat laut dan pesisir di Aceh. Nilai kearifan lokal pada suatu wilayah dibangun berdasarkan nilai-nilai sosial yang terdapat pada struktur sosial masyarakat, yang berfungsi sebagai pengontrol, pemberi instruksi, dan rambu-rambu dalam berperilaku di

berbagai aspek kehidupan, baik interaksi antar masyarakat, dan interaksi masyarakat dengan lingkungan. Sebagai wilayah otonomi, Aceh memiliki nilai kearifan lokal yang termaktub pada Qanun Aceh, nomor 10 tahun 2008 yang menyatakan bahwa, lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan adat, dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat, dengan memiliki luas wilayah, kekayaan tersendiri, diberi titah hak dan wewenang untuk mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan adat di Aceh (Munawarah dan Abdi, 2019).

Manifestasi hukum adat bagi masyarakat laut dan pesisir di Aceh adalah adanya hukum adat *laot* yang dikelola dan dijalankan bersama oleh lembaga adat, yang dikenal dengan panglima *laot*. Kehadiran Panglima Laot di Aceh sudah sejak tahun 1607 hingga tahun 1636 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Awalnya panglima *laot* hanya bertugas melakukan mobilisasi peperangan untuk mendukung rakyat Aceh melawan penjajah, memungut pajat laut dari kapal-kapal niaga yang singgah di pelabuhan, dan memiliki andil dalam ekspor-impor di wilayah Aceh kala itu (Pranita dkk., 2021). Dari catatan sejarah tersebut, jelas bahwa awal mula berdirinya panglima *laot* di Aceh adalah sebagai penggerak laju pertumbuhan ekonomi di wilayah pelabuhan dalam kegiatan perekonomian skala luas, juga pada kepentingan menjaga kedaulatan perang di wilayah Aceh, dan tidak berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan.

Pengelolaan sumberdaya wilayah laut dan pesisir bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang bergantung pada hasil kelautan dan pesisir, dengan memperhatikan aspek ekologi, kelestarian sumber daya, tetap mempertahankan ekosistem laut dan pesisir sesuai fungsi keberlanjutan. Penerapan hukum adat *laot* di Aceh untuk menjaga ketertiban dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan tidak bertentangan dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penerapan nilai kearifan lokal sejauh ini dapat menjadi jawaban atas berbagai masalah lingkungan, termasuk lingkungan laut dan pesisir dari berbagai ancaman, baik ancaman secara sosial dan budaya, juga ancaman secara ekologi dan lingkungan (Pranita dkk., 2021). Eksistensi panglima *laot* hingga hari ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal berbasis kelautan. Kehadiran panglima *laot* memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat laut dan pesisir yang bekerja sebagai nelayan di Aceh.

Sejauh ini pengetahuan tentang laut dan kearifan lokal belum menjadi fokus kajian dan belum mendapat porsi yang cukup mendalam pada kurikulum pendidikan di jenjang pendidikan di sekolah. Belum terdapat mata pelajaran yang dirancang untuk memberi pengetahuan mengenai kelautan dan hal-hal kemaritiman yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Materi penunjang pada nilai kearifan lokal berbasis kelautan sejauh ini terdapat pada mata pelajaran geografi, karena kajian geografi tidak terlepas dari mempelajari hubungan, persamaan, perbedaan ruang di bumi yang orientasinya mengacu pada kajian hubungan antar manusia dengan lingkungan, dan lingkungan terhadap manusia. Kajian geografi juga mengajarkan konsep-konsep esensial yang dapat digunakan untuk memahami hubungan, gejala, bentuk, dan fungsi dari peristiwa secara fisik dan sosial (Sumantri dkk., 2019). Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat di Indonesia mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai kelautan selama menempuh pendidikan di bangku sekolah. Sehingga tidak mengherankan jika siswa, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya di Indonesia belum memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap kelautan, dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, sehingga pembangunan berbasis kemaritiman yang dicita-citakan masih sulit terlaksana.

Program studi pendidikan geografi di perguruan tinggi memainkan peran penting dalam menghasilkan lulusan yang terampil dalam mengajarkan, meningkatkan kemampuan dan pemahaman literasi kelautan, dan menjelaskan nilai kearifan lokal di wilayah yang menjadi objek kajiannya. Hal ini tidak terlepas dari peran mata kuliah oseanografi yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari fenomena fisis dan dinamis kelautan, yang dapat diaplikasikan ke bidang-bidang ilmu lainnya yang berkaitan, baik lingkungan, pemanfaatan hasil kelautan, bencana laut dan mitigasi, kebudayaan masyarakat yang menyertainya, serta nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat laut dan pesisir, termasuk kearifan lokal hukum adat *laot* yang terdapat di Aceh. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional berbasis kemaritiman melalui nilai kearifan lokal hukum adat *laot* yang dijalankan oleh lembaga adat panglima *laot* pada masyarakat adat laut dan pesisir di Kabupaten Bireuen, dapat diterapkan melalui mata kuliah oseanografi pada program studi pendidikan geografi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pada observasi awal menggali pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang kelautan dan pengelolaan pesisir berbasis

kearifan lokal di wilayah Aceh khususnya Kabupaten Bireuen. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur. Adapun pada studi literatur meliputi literasi kelautan, *framework* literasi kelautan, kearifan lokal masyarakat pesisir, hukum adat *laot* yang dilaksanakan oleh panglima *laot* di Aceh, yang meliputi regulasi, peraturan perundang-undangan terkait, artikel ilmiah dan/atau wawancara mendalam terhadap beberapa mahasiswa, akademisi, dan narasumber kunci lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan sebagian besar mahasiswa belum pernah mendengar kearifan lokal panglima *laot* yang ada pada lingkungan sekitar dan baru mendengar saat dijelaskan. Hal ini sangat disayangkan dimana ini merupakan lingkungan dan adat yang ada di Aceh. Oleh karena itu perlu melibatkan mahasiswa secara langsung untuk observasi laut dan pesisir dimana dapat dimasukkan kedalam kajian tugas perkuliahan. Ini merupakan salah satu bentuk menjaga eksistensi kearifan lokal yang ada. Nilai-nilai lokal yang ada diintegrasikan dalam pembelajaran geografi, terdapat aspek sosial budaya, lingkungan serta hubungan manusia dengan lingkungannya.

Lautan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, air dan oksigen disediakan oleh laut serta menjadi pelindung cuaca dan iklim. Laut menyediakan sumber makanan, obat-obatan, menjadi tempat wisata yang dapat meningkatkan perekonomian. Begitu besarnya manfaat laut untuk manusia, tinggal bagaimana mengelola serta menjaga pemberian sang pencipta untuk generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Dengan adanya kearifan lokal panglima *laot* di Aceh dapat menjadi penggerak menjaga dan mengelola pemberian sang pencipta.

Panglima *laot* merupakan seorang pemimpin lembaga hukum adat *laot* atau nelayan yang memiliki tugas memimpin keberlangsungan adat di bidang kelautan dan perikanan Aceh, baik pada lingkup wilayah Provinsi Aceh atau kabupaten. Hukum adat *laot* dibentuk berdasarkan resam adat istiadat yang telah berlangsung lama dan turun-temurun. Adapun pantangan-pantangan atau aturan aturan meliputi: a). pantang melaut pada hari jumat atau dari malam jumat hingga terbenam matahari. b). pantangan melaut pada hari *khenduri laot*, c). pantangan melaut pada hari peringatan Tsunami Aceh, c) pantangan melaut pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Pemerintah sangat mendukung keberadaan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan adanya Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Adapun pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi dan dapat memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan mempertimbangkan ekologis yang berkelanjutan. Pengelolaan pesisir secara arif dan bijaksana telah dilakukan sejak zaman dulu oleh masyarakat adat. Adapun pengelolaan pesisir dipimpin oleh seorang ketua yaitu panglima *laot*. Pengelolaan pesisir di wilayah Bireuen dipimpin oleh seorang panglima *laot*. Adapun tugas panglima *laot* senada Triannur (2019) yaitu (1) sebagai penegak hukum adat *laot*, (2) menentukan tata tertib penangkapan ikan (3) melaksanakan, memelihara serta mengawasi penerapan adat istiadat serta hukum adat *laot* dalam segala aspek dan melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran adat; (4) menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut; (5) menjaga dan melestarikan pohon-pohon di pinggir pantai terutama ekosistem mangrove dari kerusakan serta penebangan illegal; (6) mencegah penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (7) menjaga kebersihan kelautan dari pencemaran; (8) mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

Adapun fungsi panglima *laot* yaitu sebagai; menjadi pemimpin pelaksanaan hukum adat *laot*, penegak hukum adat *laot* dan pemimpin sidang adat *laot*, menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah serta panglima *laot* dapat menjadi suksesor dalam pembangunan Indonesia menjadi poros maritim. Peraturan dalam lembaga adat panglima *laot* sejalan dengan UU No 60 tahun 2007 tentang konservasi, bagaimana upaya melindungi, melestarikan serta memanfaatkan ekosistem laut sebagai penyangga kehidupan untuk dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Lembaga adat *laot* merupakan kearifan lokal berbentuk lembaga adat, ini menjadi kontrol sosial dalam masyarakat, dan panglima *laot* sebagai seorang ketua adat dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat nelayan. Lembaga adat ini terdapat kegiatan khanduri *laot*, larangan pada hari Jumat, larangan pada hari lebaran dan hari hari kegiatan besar keagamaan ini merupakan salah satu contoh dari nilai religius. Hal ini senada dengan Triannur (2019) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa nilai positif pada lembaga adat panglima *laot*, seperti (1) nilai religius. (2) nilai konservasi, (3) nilai sosial, (4) nilai hukum dan keadilan, (5) nilai pembangunan keberlanjutan, (6) nilai kepemimpinan, dan (7) nilai kekeluargaan (Triannur, 2019).

Kearifan lokal dan hukum adat panglima *laot* ini sangat melarang membuang sampah, oli, dan barang barang sisa yang dapat merusak ekosistem di laut. Adapun jika terdapat

masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Adat dalam menjaga lingkungan kelautan dan pesisir terdapat larangan melakukan pengeboman, pukut harimau, perusakan terumbu karang, meracun ikan serta menangkap ikan yang dilindungi dan melarang menebang pohon pesisir pantai seperti cemara, bakau dan lainnya. Adanya panglima *laot* dan kuatnya penerapan aturan adat *laot* dapat membantu serta menjaga lingkungan kelautan.

Kearifan lokal dan hukum adat panglima *laot* sangat melarang membuang sampah, oli, dan barang-barang sisa yang dapat merusak ekosistem di laut. Adapun jika terdapat masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Adat dalam menjaga lingkungan kelautan dan pesisir terdapat larangan melakukan pengeboman,



pukut harimau, perusakan terumbu karang, meracun ikan serta menangkap ikan yang dilindungi dan melarang menebang pohon pesisir pantai seperti cemara, bakau dan lainnya. Adanya panglima *laot* dan kuatnya penerapan aturan adat *laot* dapat membantu serta menjaga lingkungan kelautan.

a). Kondisi Kuala

b). Kondisi Pantai

Kearifan lokal panglima *laot* dan kegiatan masyarakat di wilayah pesisir dapat dijadikan sebagai bahan kajian mata kuliah Oseanografi. *Framework* kelautan terdapat satu pembahasan dimana adanya hubungan laut dengan manusia. Laut menyediakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan, begitu juga dengan manusia dapat menjadi faktor penyelamat bahkan sebagai perusak laut. Pengelolaan kelautan dan pesisir dibawah kendali panglima *laot* dalam menjalankan hukum adat *laot* menjadi bahan penguatan menuju Indonesia poros maritim kedepannya.

## PENUTUP

Kearifan lokal dalam pengelolaan laut dan pesisir yang dipimpin oleh panglima *laot* menerapkan aturan yang berlaku. Panglima *laot* masih disegani keberadaannya oleh masyarakat

nelayan. Ini merupakan cerminan bahwa masyarakat nelayan masih sangat memegang adat istiadat dan mematuhi hukum adat yang belaku. Masyarakat nelayan Bireuen memandang panglima *laot* sebagai tempat mereka mengeluarkan keluh kesah atau tempat mengadu, sebagai penengah konflik perselisihan masyarakat. Panglima *laot* dan nelayan menjaga laut dan wilayah pesisir, ini merupakan perwujudan dari rasa cinta terhadap pemberian sang pencipta. Dengan rasa cinta tersebut masyarakat menjaga serta melindungi laut dan pesisir dari kerusakan. Namun sebagian kecil pada wilayah laut kawasan Bireuen masih belum sepenuhnya terjaga, ini kedepannya perlu adanya tindak lanjut baik berupa sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah maupun praktisi pemerhati lingkungan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan, untuk kelestarian lingkungan laut maupun untuk menjaga tajuk hijau disepanjang pesisir sebagai bentuk mitigasi bencana. Dengan mengangkat kasus dan kajian kearifan lokal panglima *laot* dalam pengelolaan pesisir yang ada pada lingkungan sekitar mahasiswa, diharapkan menjadi literasi dan menjaga eksistensi kearifan lokal yang ada di Aceh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Evi. 2016. Kearifan Lokal Masyarakat Aceh dalam Konservasi Laut. *Serambi Saintia*. Vol. IV, No. 1. ISSN: 2337-9952.
- Hidayat, Muhammad Fajar. 2017. Politik Pengadilan Perikanan di Indonesia. *Jurnal Selat Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Vol. 4 No. 2 p.2354-8649 I e-2579-5767.
- Irawan, Bony. 2018. Framework Literasi Kelautan Sebagai Acuan Pembelajaran Sains di Negara Maritim. *J. Pedagogi Hayati*. Vol.2 No.1 ISSN: 2503-0752 e-ISSN: 2579-4132.
- Munawwarah, Raudhatul dan Abdi, Abdul Wahab. 2019. Eksistensi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Laut Di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie. *Jurnal Pendidikan Geosfer Vol IV Nomor 2*. ISSN: 2541-6936.
- Pranitas, Annisa Mutia, dkk. 2021. Peran Panglima Laot dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security di Aceh. *Journal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol 9 No.3 E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295.
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Laot.
- Sumantri, dkk. 2019. *Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) Kerentanan Bencana*. Jakarta: CV. Makmur cahaya Ilmu. ISBN 978-602-53845-8-5.

- Sumardi, Rusjdi Ali Muhammad, dan Dedy. 2011. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*. Kota Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Ula, Miratul. 2021. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 10, No. 2 DOI: 10.22373/legitimasi.v10i2.11346.
- Utami, Fahira Putri, dkk. 2021. Identifikasi Kemampuan Literasi Kelautan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 6 (1): 81 -86 DOI: <https://doi.org/10.293030/jipp.v6i1.160>.
- Kemenkumham Tim Pengkajian Hukum. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut Di Indonesia. (2015).
- Triannur, S. A. (2019). *Eksistensi Panglima Laôt Sebagai Upaya Pelestarian Ekosistem Laut Di Wilayah Langsa: Kajian Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pembelajaran Geografi* (Magister dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Triannur, S. A., Rohmat, D., & Ruhimat, M. Local Wisdom of Panglima Laôt and Hukom Adat Laôt as Mitigation of Marine Ecosystem Damage. *PROCEEDING BOOK VOL. 2*, 167.
- Cahyadi, F. D., & Astiyani, W. P. Literasi Kelautan Dalam Perkuliahan Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Untuk Menunjang Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pendidikan Perikanan Kelautan*, 1(1), 45-51.